



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014**

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung hilirisasi produk industri kehutanan perlu didukung dengan sumber bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor, menciptakan tertib administrasi, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspor produk industri kehutanan melalui sistem verifikasi legalitas kayu, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.
2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
3. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya disingkat ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan.
4. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang selanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan.

5. Industri Kecil dan Menengah pemilik ETPIK yang selanjutnya disebut IKM pemilik ETPIK adalah industri pemilik Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
7. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah izin untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan yang berbahan baku kayu ulin.
8. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Deklarasi Ekspor adalah pernyataan dari IKM pemilik ETPIK bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas.
10. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
11. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
13. Sistem Informasi Legalitas Kayu *Online* yang selanjutnya disebut SILK *Online* adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
16. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
17. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

## Pasal 2

Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK; dan
  - b. perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen.
- (2) Kewenangan menerbitkan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada koordinator pelaksana UPTP.

## Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, perusahaan industri kehutanan harus mengajukan permohonan kepada koordinator pelaksana UPTP secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, bagi perusahaan berbadan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum;
  - e. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang, bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan
  - f. rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan harus mengajukan permohonan kepada koordinator pelaksana UPTP secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, bagi perusahaan berbadan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum;
  - e. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang, bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum;
  - f. fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan industri produk kehutanan skala kecil bukan pemilik ETPIK yang disahkan oleh notaris setempat; dan
  - g. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan sesuai dengan domisili perusahaan pemohon.

#### Pasal 6

Koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri menerbitkan:

- a. pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar; atau
- b. penolakan permohonan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

#### Pasal 7

- (1) Pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan produksi dan ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (3) Masa berlaku pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (4) Dalam hal masa berlaku pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengakuan sebagai ETPIK sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan cukup dilengkapi dengan dokumen huruf a sampai dengan huruf e.

- (5) Dalam hal masa berlaku pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan cukup dilengkapi dengan dokumen huruf a sampai dengan huruf f.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen kepada koordinator pelaksana UPTP secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> sejak terjadi perubahan data dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud.
- (2) Dalam hal salah satu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) akan habis masa berlakunya, perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen kepada koordinator pelaksana UPTP secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dokumen tersebut habis masa berlakunya.
- (3) Koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri menerbitkan:
- perubahan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar; atau
  - penolakan permohonan perubahan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

#### Pasal 9

ETPIK Non-Produsen dapat bekerjasama dengan perusahaan industri kehutanan pemegang IUI bukan pemilik ETPIK.

#### Pasal 10

Dalam hal ekspor dilakukan oleh ETPIK Non-Produsen, Produk Industri Kehutanan harus berasal dari perusahaan industri kehutanan yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Pasal 9 yang tercantum dalam dokumen ETPIK Non-Produsen.

Pasal 11

- (1) Apabila diperlukan terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen, Direktur dapat menugaskan pejabat untuk melakukan pemeriksaan mengenai:
  - a. keabsahan dokumen yang dipersyaratkan pada saat permohonan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2);
  - b. keberadaan perusahaan baik industri dan/atau kantor; dan
  - c. kegiatan usaha produksi atau ekspor sesuai dengan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang dimiliki.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkoordinasi dan/atau oleh Surveyor independen.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00, Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00, Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus *laminated block* dan *laminated board*), Ex. 4415.10.00.00 dan Ex. 4415.20.00.00 (khusus *palet kotak* dan *palet papan*), Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) dapat diekspor apabila memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surfaced Four Side (S4S)* atau olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran.

Pasal 13

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi.



- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Setiap ekspor Produk Industri Kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus disertai SPE dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pemilik ETPIK dan ETPIK Non-Produsen harus mengajukan permohonan secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan/atau tertulis kepada koordinator pelaksana UPTP dengan melampirkan:
  - a. fotokopi dokumen ETPIK dan ETPIK Non-Produsen;
  - b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - c. fotokopi laporan hasil verifikasi produk kayu ulin olahan (Prokalino) dari Surveyor independen.
- (3) Koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri menerbitkan:
  - a. SPE paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar; atau
  - b. penolakan permohonan SPE paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau benar.
- (4) Masa berlaku SPE paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 15

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi Dokumen V-Legal terhadap produk industri kehutanan sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Lampiran I Kelompok A; dan
  - b. Lampiran I Kelompok B.
- (2) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LVLK yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 16

- (1) Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) LVLK mengirimkan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *SILK Online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 17

- (1) IKM pemilik ETPIK yang belum memiliki S-LK dapat mengekspor Produk Industri Kehutanan pada Lampiran I Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (2) IKM pemilik ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengekspor Produk Industri Kehutanan pada Lampiran I Kelompok B, hanya IKM pemilik ETPIK yang terdapat dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS Ex.4414.00.00.00, Ex.4416.00.10.00, Ex.4416.00.90.00, Ex.4417.00.10.00, Ex.4417.00.90.00, Ex.4419.00.00.00, 9401.61.00.00, 9401.69.00.10, 9401.69.00.90, 9403.30.00.00, 9403.40.00.00, 9403.50.00.00, 9403.60.10.00, 9403.60.90.00 dan 9403.90.90.00.
- (2) IKM pemilik ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal.
- (3) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diekspor oleh IKM pemilik ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke negara yang sudah memiliki kerja sama dan/atau nota kesepahaman mengenai penegakan hukum kehutanan, penatalaksanaan dan perdagangan produk kayu (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) dengan Pemerintah Republik Indonesia wajib menggunakan Dokumen V-Legal.

Pasal 19

- (1) IKM pemilik ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang mengekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib menyampaikan Deklarasi Ekspor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- (2) IKM pemilik ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengirimkan Deklarasi Ekspor melalui *SILK Online* ke portal *Indonesia National Single Window (INSW)* secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Deklarasi Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 20

- (1) Setiap 1 (satu) Deklarasi Ekspor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Ketentuan mengenai Deklarasi Ekspor yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 21

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan berupa Pulp dan Kertas yang berbahan baku bukan kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dalam hal ini Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah eksportir menyampaikan bukti uji laboratorium bahwa bahan baku Pulp dan Kertas tersebut bukan berasal dari kayu.

Pasal 22

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
  - c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang verifikasi atau penelusuran teknis Produk Industri Kehutanan; dan
  - d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
  - a. kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik, meliputi:
    1. keabsahan dokumen ETPIK dan ETPIK Non-Produsen; dan
    2. keabsahan Dokumen V-Legal;
  - b. kegiatan verifikasi fisik, meliputi:
    1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
    2. jumlah barang;
    3. jenis kayu;
    4. kriteria teknis;
    5. kesesuaian Pos Tarif/HS;
    6. melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
    7. melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.
- (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- (6) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (7) Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan:
  - a. rencana dan realisasi produksi tahunan, dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan pemilik ETPIK; atau
  - b. rencana dan realisasi ekspor tahunan bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari untuk:
  - a. realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik ETPIK; atau
  - b. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan rencana ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara manual dan/atau *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 24

Pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dibekukan apabila perusahaan, pengurus dan/atau direksi perusahaan pemilik ETPIK atau pemilik ETPIK Non-Produsen:

- a. tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perusahaan pemilik ETPIK atau tidak melakukan kegiatan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2);
- c. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

Pasal 25

- (1) Pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan, pengurus dan/atau direksi perusahaan pemilik ETPIK atau pemilik ETPIK Non-Produsen:
  - a. kembali melakukan kegiatan produksi dan akan melaksanakan ekspor untuk perusahaan pemilik ETPIK atau akan melaksanakan ekspor untuk perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen;
  - b. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2);
  - c. telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - d. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pengaktifan kembali ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau direksi perusahaan pemilik ETPIK atau pemilik ETPIK Non-Produsen kepada koordinator pelaksana UPTP secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dilengkapi dengan dokumen:
  - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), bagi pemilik ETPIK;
  - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi pemilik ETPIK Non-Produsen;
  - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan
  - f. dokumen yang mendukung terpenuhinya syarat-syarat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dicabut apabila perusahaan, pengurus dan/atau direksi perusahaan pemilik ETPIK atau pemilik ETPIK Non-Produsen:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan data dan/atau habis masa berlaku dokumen;
- b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembekuan;

- c. terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan/atau pelanggaran ketentuan di bidang ekspor berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. telah dilakukan pembekuan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan untuk pembekuan kembali;
- g. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang telah dibekukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- h. menyampaikan data atau dokumen yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan:
  - 1. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen; atau
  - 2. perubahan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen.

#### Pasal 27

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pencabutan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dilakukan oleh koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri.
- (2) Koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan, dan pencabutan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan dan bidang perdagangan.

#### Pasal 28

Terhadap surveyor yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan.
- b. menerbitkan LS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) surveyor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan.

Pasal 29

Terhadap ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian dan barang keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengakuan sebagai ETPIK;
- b. pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen; dan
- c. SPE,

yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

KELOMPOK A

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
2.	Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau " <i>end jointed</i> " maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
3.	Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".
4.	Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
5.	Ex 4411.12.00.00 s.d Ex 4411.94.00.00	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
6.	Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
7.	Ex. 4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
8.	Ex. 4415.10.00.00 Ex. 4415.20.00.00	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
9.	Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake".
10.	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.
11.	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.
12.	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik.
13.	4702.00.00.00	Pulp kayu kimia, mutu larut ( <i>dissolving grade</i> ).
14.	4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut ( <i>dissolving grade</i> ).
15.	4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00	Pulp kayu kimia, sulfit, selain mutu larut.
16.	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
17.	Ex. 4803.00.30.00 Ex. 4803.00.90.00	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, diperforasi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
18.	Ex. 4804.21.10.00 dan Ex. 4804.21.90.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen, yang berasal dari kayu.</li> <li>- Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis lain-lain, yang berasal dari kayu.</li> </ul>
19.	Ex. 4806.10.00.00 s.d Ex. 4806.40.00.00	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
20.	Ex. 4808.40.00.10	Sack Kraft Paper, yang berasal dari kayu.
21.	Ex. 4809.20.00.00 s.d Ex. 4809.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat <i>offset</i> ), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
22.	Ex. 4812.00.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas, yang berasal dari kayu.
23.	Ex. 4813.10.00.00 s.d Ex. 4813.90.90.00	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
24.	Ex. 4814.20.00.00 Ex. 4814.90.00.00	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela, yang berasal dari kayu.
25.	Ex. 4816.20.10.00 s.d Ex. 4816.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat <i>offset</i> , dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
26.	Ex. 4818.10.00.00 s.d Ex. 4818.90.00.00	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.

#### KELOMPOK B

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4401.21.00.00 Ex. 4401.22.00.00	Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>wood in chip or particles</i> ).
2.	Ex. 4404.10.00.00 Ex. 4404.20.10.00	Kepingan kayu ( <i>chipwood</i> ).
3.	Ex. 4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
4.	Ex. 4416.00.10.00 Ex. 4416.00.90.00	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
5.	Ex. 4417.00.10.00 Ex. 4417.00.90.00	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
6.	Ex. 4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu.
7.	Ex. 4421.90.20.00	Batang kayu korek api.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
8.	Ex. 4802.10.00.00 s.d Ex. 4802.69.00.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak diperforasi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan, yang berasal dari kayu.
9.	Ex. 4804.11.00.00 s.d Ex. 4804.19.00.00 dan Ex. 4804.29.00.00 s.d Ex. 4804.59.00.00	Kertas dan kertas karton kraft tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud pada pos 48.02 atau 48.03, yang berasal dari kayu.
10.	Ex. 4805.11.00.00 s.d Ex. 4805.93.90.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, yang berasal dari kayu.
11.	Ex. 4807.00.00.00	Kertas dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
12.	Ex. 4808.10.00.00 dan Ex. 4808.40.00.90 s.d Ex. 4808.90.90.00	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau diperforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, yang berasal dari kayu.
13.	Ex. 4810.13.11.00 s.d Ex. 4810.99.90.00	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
14.	Ex. 4811.10.21.00 s.d Ex. 4811.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10, yang berasal dari kayu.
15.	Ex. 4817.10.00.00 s.d Ex. 4817.30.00.00	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat, yang berasal dari kayu.
16.	Ex. 4821.10.10.00 s.d Ex. 4821.90.90.00	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
17.	Ex. 4822.10.10.00 s.d Ex. 4822.90.90.00	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton ( <i>diperforasi</i> atau dikeraskan maupun tidak), yang berasal dari kayu.
18.	Ex. 4823.20.10.00 s.d Ex. 4823.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
19.	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
20.	9401.69.00.10 9401.69.00.90	Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).
21.	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
22.	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur.
23.	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
24.	9403.60.10.00 9403.60.90.00	Perabotan kayu lainnya.
25.	9403.90.90.00	Bagian Perabotan dari Kayu.

KELOMPOK C

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	4601.22.00.00	Lampit dan tirai dari rotan.
2.	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
3.	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
4.	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK  
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

- a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm<sup>2</sup>.
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup>.

- b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm<sup>2</sup>.
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup>.

- c. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.

- d. *Laminated Board (Jointed Board)* yang termasuk HS.4412:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di *pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup>.

- e. *Laminated Block* yang termasuk HS.4412:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di *pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 6.000 mm<sup>2</sup>

- f. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm<sup>2</sup>;
- 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
  - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
  - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
  - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
  - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.
- 3) Untuk *Decorative Profile* Muka tebal :
  - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
  - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
  - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
  - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
  - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm<sup>2</sup> tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm<sup>2</sup>

- h. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm<sup>2</sup>.

- i. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup> dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.



j. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm<sup>2</sup> dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

k. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm<sup>2</sup>, dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

l. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm<sup>2</sup>;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole, main sill, cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

m. Palet kotak dan palet papan (HS.4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

n. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

o. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

p. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm<sup>2</sup> mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm<sup>2</sup> mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm<sup>2</sup> sampai dengan 14.400 mm<sup>2</sup> mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

q. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm<sup>2</sup>.

## 2.Toleransi ukuran dan kecacatan

a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:

- tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
- lebar tidak lebih dari 1 mm;
- panjang tidak lebih dari 50 mm.

b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine – defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

<b>LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN</b>			
<b>TAHUN :</b>			
Nama Perusahaan        :			
Nomor ETPIK             :			
<b>No.</b>	<b>Uraian Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
<b>TOTAL</b>			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 LASMINGSIH



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

**LAPORAN REALISASI PRODUKSI TAHUNAN**  
**TAHUN :**

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
<b>TOTAL</b>			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

**LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN**

**TAHUN :**

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK/ETPIK Non-Produsen :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
<b>TOTAL</b>					

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

**LAPORAN REALISASI EKSPOR TAHUNAN**

**TAHUN :**

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK/ETPIK Non-Produsen :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Nilai Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	Nilai	MTU*)	
<b>TOTAL</b>							

Keterangan :\*) MTU : Kode Mata Uang Negara

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH